

RINGKASAN

**ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI
DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TIMUR**

Nurul Istifadah

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga Surabaya

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, yaitu UU No.22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta revisi UU Otonomi Daerah No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyerahkan fungsi, personil, dan asetnya kepada pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga sistem pemerintahan menjadi terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang lebih bersifat dekonsentrasi dan koadministrasi.

Ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Otonomi Daerah telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, moneter, fiskal, hukum, dan urusan agama. Kekuasaan provinsi, kabupaten dan kota meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja.

Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang mampu menopang tanggung jawab tersebut. Sumber fiskal tersebut berupa pajak, dana perimbangan, serta pinjaman. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (2) mengidentifikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur setelah era otonomi daerah; (3) menganalisis pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari dana DAU dan DAK; (4) menganalisis permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di provinsi Jawa Timur; dan (5) menganalisis proses kemandirian pemerintah provinsi Jawa Timur terutama di bidang keuangan dengan adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

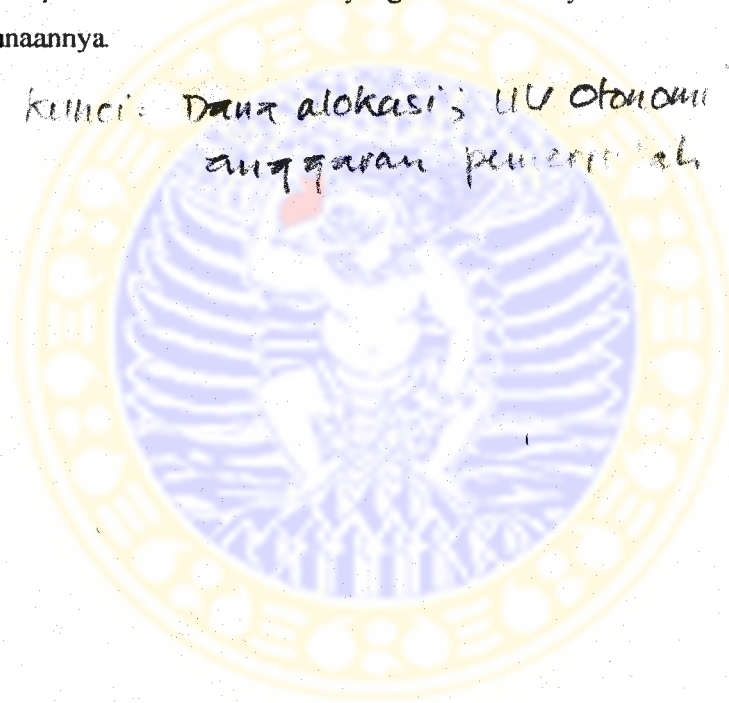
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental eksplanatori. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive* di wilayah pemerintah provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah penelitian ini adalah karena provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sehingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara makro.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola struktur anggaran dan sistem fiskal pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah kebijakan UU Otonomi Daerah tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, tidak terdapat permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Jawa Timur. Justru terdapat performa yang semakin bagus dari sisi struktur penerimaan anggaran daerah Jawa Timur, yaitu dengan makin besarnya peran PAD menggantikan sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian

pemerintah provinsi Jawa Timur terutama di bidang keuangan (anggaran penerimaan).

Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalam penggunaan anggarannya dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusat terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang anggaran, yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan, maka pemerintah Jawa Timur semakin memiliki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya. Namun demikian, besarnya anggaran penerimaan yang diperoleh, baik dari PAD, DAU, DAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih efisien dalam penggunaannya.

Kata kunci: Dana alokasi; UU Otonomi daerah, anggaran pemerintah



Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 5633/JO3/PP/2005
Kontrak Nomor : 989/JO3.2/PG/2005
Tanggal : 28 Juli 2005

SUMMARY

ANALYSIS OF DAU AND DAK IS CAUSED BY THE IMPLEMENTATION OF LOCAL OTONOMY REGULATION ABOUT THE BALANCING FUND FROM CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENT IN EAST JAVA PROVINCE

Nurul Istifadah

Departement of Economic, Airlangga University, Surabaya

Local Autonomy regulation, UU No. 22 about Local Government, UU No. 25 about Balancing Fund from Central Government to Local Government is revised by UU No. 32/2004 and UU No. 33/2004. Its explained that central government gives its functions, customs, and assets authority to local government, such as province and kabupaten/kota. Hence, government systems come to be decentralize compare with before systems which is deconcentration and coadministration.

Decentralization is supported by central government to local government, which is need to fiscal sources. The sources is funding that come from income APBN. The balancing fund is redistribution fund from central government to local government such as Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK).

The purpose of this research is to find out the influences of budget structure change in East Java local government. This research observed the change that is caused by the implementation at new local autonomy regulation in East Java Province. This research investigates five issues those are : (1) the structure for East Java budget; (2) the change of the fiscal system; (3) the budget structure for the DAU and DAK; (4) the fiscal problem is caused by the local autonomy policy implementation; and (5) the financial process of the budget is replaced by balancing fund.

The type of this research is qualitative non experimental expalatory. The data is secondary. Location of research is given by purposive region in East Java Province. By the reason of the location is becaused that the East Java province is the bigger for the population, economic growth from the others.

The research shows that the structure budget and fiscal system is different since East Java have implemented the local autonomy policy implementation. Meanwhile, there were not problem for the implication.

This research presents that the budget structure for the DAU usage increase in East Java government, but is not receive for DAK. This situation is caused by local autonomy policy implementation for the balancing fund. However, the use of DAU must be efficient.

Also, this research found that the East Java Province have flexibility using for their budget. The controlling from central government is limitation. However, the use of incoming budget must be efficient.

Key words: *APBD (Local Budget), local autonomy, balancing fund, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Funded by DIPA Airlangga University
Number of SK Rector : 5633/JO3/PP/2005
Number of Contract : 989/JO3.2/PG/2005
Date : 28 Juli 2005